

Bapenda

Jl. Tumanurung No. 5 Sungguminasa, 92111

<http://humas.gowakab.go.id/tag/Bapenda->



RENCANA KERJA (Renja) Tahun 2022

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KAB. GOWA**



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Tumanurung No. 5 Sungguminasa, Kode Pos 92111

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR : 008/25/BAPENDA/III/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2022, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2022;
 - b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2022;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2021;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2028;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026;
26. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 008/355/BAPENDA/IX/2021 tentang Rencana Strategis Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA**

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- Melakukan pengumpulan data/bahan penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2022;
- Melakukan pengolahan data/bahan penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2022;
- Melakukan analisis data untuk dirumuskan menjadi bahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2022;
- Menyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2022;
- Melakukan finalisasi Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2022.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa

Pada Tanggal : 04 Maret 2021

Kepala Badan Pendapatan Daerah



Drs. H. Ismail Majid

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19620917 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2022 DI
LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR : 008/25/BAPENDA/III/2021
TANGGAL : 04 Maret 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA

Pembina : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa
Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa
Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah
Wakil Ketua I : Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan
Wakil Ketua II : Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Wakil Ketua III : Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah
Sekretaris : Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan
Anggota : Kasubag. Umum dan Kepegawaian

1. Kasubag. Keuangan
2. Kasubid. Perencanaan Pendapatan Daerah
3. Kasubid. Pengembangan Pendapatan Daerah
4. Kasubid. Hukum dan Perundang-undangan
5. Kasubid. Pelayanan PBB-2
6. Kasubid. Pelayanan BPHTB
7. Kasubid. Pendapatan Lainnya
8. Kasubid. Penetapan
9. Kasubid. Penagihan
10. Kasubid. Pembukuan
11. Kasubid. Penertiban dan Keberatan
12. Kasubid. Pengawasan dan Pengendalian
13. Kasubid. Pengelolaan Benda Berharga

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 04 Maret 2021

Kepala Badan Pendapatan Daerah



Drs. H. Ismail Majid
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19620917 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Tumanurung No. 5 Sungguminasa, Kode Pos 92111

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR : 008/402/BAPENDA/IV/2021

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diarahkan pada pelaksanaan program-program pembangunan guna terwujudnya tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Gowa, perlu adanya Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk maksud pada point (a) diatas maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2021;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2028;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026;
26. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 008/355/BAPENDA/IX/2021 tentang Rencana Strategis Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul yang menghasilkan suatu rencana kerja instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.
- KETIGA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan, statistik, dan penanaman modal penataan ruang daerah.
- KEEMPAT : Sistematis Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB V : PENUTUP
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 5 April 2021

Kepala Badan Pendapatan Daerah



[Handwritten Signature]

Drs. H. Ismail Majid
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19620917 199103 1 005

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan Ke Hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala Rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah merupakan suatu bagian dari rangkaian sistem perencanaan bagi pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas kerjanya dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan harus menyusun suatu program kerja menurut tugas pokok dan fungsinya, sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai, hal ini diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan pada Rencana Kerja. Penyusunan Rencana Kerja berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2022.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja ini terdapat kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan dan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa tahun 2022 diucapkan banyak terima kasih. Semoga Renja ini dapat bermanfaat sebagai pedoman pelaksanaan tugas membangun kabupaten Gowa yang handal dalam peningkatan pendapatan daerah.

Sungguminasa, 5 April 2021

Kepala Badan Pendapatan Daerah



Drs. H. Ismail Majid
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19620917 199103 1 005

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	29
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	37
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	38
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	39
3.3 Program dan Kegiatan	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	48
BAB V PENUTUP	55

DAFTAR TABEL

		<i>Halaman</i>	
TABEL	2.1	Review Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021	19
	2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah	26
	2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022	33
	2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022	37
	3.1	Indikator dan Target Kinerja Tahun 2022 yang Mengacu pada Tujuan Renja	40
	3.2	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Renja	40
	3.3	Indikator dan Target Kinerja Tahun 2022 yang Mengacu pada Sasaran Renja	41
	3.4	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023	44
	4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	51

DAFTAR GAMBAR

		<i>Halaman</i>
TABEL	1.1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten/Kota
		2

BAB I

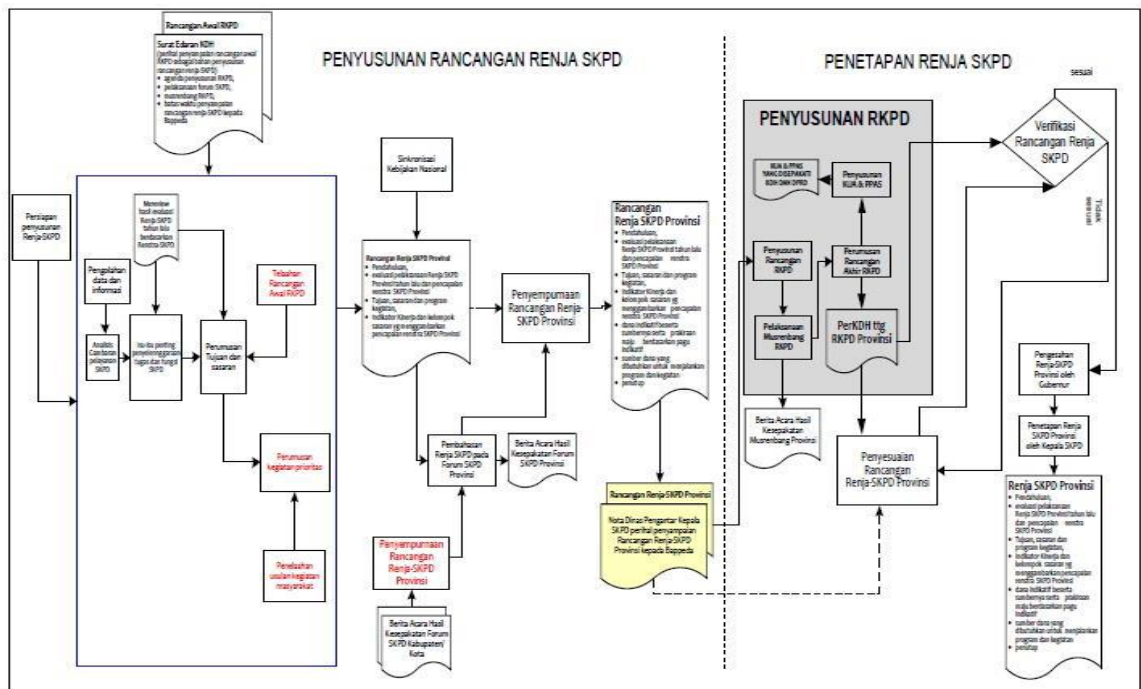
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat daerah menyusun rancangan awal rencana kerja dengan berpedoman pada Renstra perangkat daerah, hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun berjalan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Gowa, Renstra Bapenda Kab. Gowa, serta berpedoman pada Renja Kementerian/ Lembaga Tingkat Pusat dan Renja Badan Pendapatan daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Penyusunan rancangan

Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Bagan alur tahapan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten/Kota



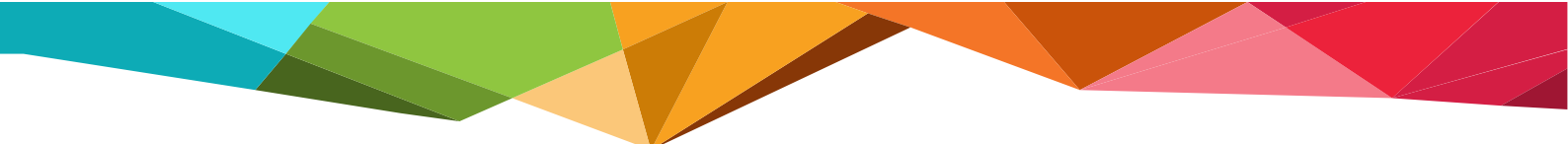
Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2022 mempunyai fungsi yang penting yaitu sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

2. Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan/dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022; dan
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2022.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 berdasarkan:

- Pendekatan Kinerja bahwa program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian sumber daya dalam anggaran untuk melaksanakannya secara efektif dan efisiensi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
- Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah bahwa pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang diperkirakan dalam prakiraan maju;
- Pendekatan Perencanaan dan Penganggaran Terpadu bahwa pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah;
- Kerangka pendanaan dan pagu indikatif, jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.



Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, berkewajiban menyusun dokumen perencanaan tahun 2021 dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) yang disesuaikan dengan ketugasan dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gowa Tahun 2022, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, solusi dalam memecahkan permasalahan, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terarah sehingga tujuan dari sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dapat tercapai. Disamping itu sebagai upaya mendukung Pemerintah Kabupaten Gowa mewujudkan prioritas daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gowa Tahun 2022. Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan daerah Tahun 2022 didasarkan pada beberapa peraturan dan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
28. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Bupati Gowa No 38 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11);
30. Peraturan Bupati Gowa Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
31. Peraturan Bupati Gowa Nomor 09 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gowa Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
32. Peraturan Bupati Gowa Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026;
34. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 008/355/Bapenda/IX/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

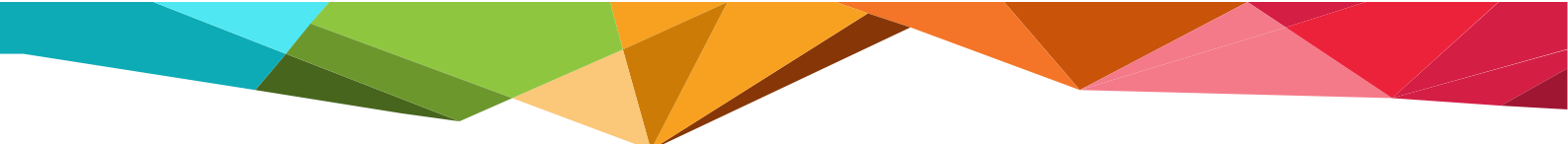
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk memberikan landasan strategis dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, sebagai acuan/dasar bagi perencanaan dan pembangunan tahun 2022 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi pelaksanaan, perencanaan, dan program/kegiatan serta memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022.

b. Tujuan

- Menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan pengelolaan pajak daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Gowa.
- Pedoman kebijakan penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun 2022, agar dapat terlaksana dan bermanfaat dalam rangka meningkatkan Pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.



Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa
Tahun 2022 disusun dengan sistematika yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH



valuasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang terjadi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan rencana Kerja tahun lalu diharapkan dapat menjadi perbandingan untuk rencana kerja tahun berjalan. Evaluasi yang dilaksanakan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan pencapaian target dan realisasi pendapatan, pelaksanaan program dan kegiatan, hasil rencana program dan kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2020, Badan Pendapatan Daerah memberikan kontribusi terhadap pencapaian penyelenggaraan pemerintahan misi kelima meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan demokratis, dengan arah kebijakan prioritas pembangunan daerah, yaitu Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas pencapaian target dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Pengembangan inovasi layanan dari penanganan pengaduan masyarakat. Kontribusi pencapaian kebijakan tersebut ditandai dengan capaian peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak daerah sebesar Rp 115.543.741.226,- (109,33%) dari target sebesar Rp 105.679.635.430,- dengan predikat kinerja Sangat Tinggi dan ditunjang oleh indeks

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah mencapai 93,58%. Pendapatan asli daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa terdiri dari:

- A. Pendapatan Pajak Daerah dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 105.679.635.430,- dan terealisasi sebesar Rp. 115.543.741.226,- (109,33%) terdiri dari 8 (Delapan) mata pajak, sebagai berikut :
 1. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 41.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 41.851.304.433,00 (102,08%);
 2. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 13.379.635.430,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.841.128.860,- (110,92%);
 3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan jumlah anggaran Rp. 41.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 47.651.652.250,- (116,22%);
 4. Pajak Air Bawah Tanah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 164.408.073,- (82,20%)
 5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan jumlah target sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 856.335.000,- (85,63%);
 6. Pajak Hotel dengan target sebesar Rp 1.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 937.157.283,- (93,72%);
 7. Pajak Restoran dengan target sebesar Rp 6.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 7.607.821.165 (126,80%)
 8. Pajak Hiburan dengan target sebesar Rp 1.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp 590.985.305,- (59,10).
- B. Retribusi daerah dengan jumlah anggaran Rp 73.414.583.729,- dan terealisasi sebesar Rp 66.507.429.022,99,- (90,59%);
- C. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dengan jumlah anggaran Rp 5.020.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 4.342.158.893,- (86,50%);

D. Lain-lain PAD yang sah dengan jumlah anggaran Rp 44.059.797.464,- dan terealisasi sebesar Rp 55.076.233.423,35,- (125%);

Badan Pendapatan Daerah mengelola 7 (tujuh) Program dan 23 (Dua Puluh Tiga) kegiatan, sebagai berikut:

- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan jumlah anggaran sebesar Rp 477.767.299,- dan terealisasi sebesar Rp 454.9.9.337,- (95,21%) terdiri dari 5 (Lima) kegiatan, sebagai berikut:
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 84,000,000,- realisasi sebesar Rp. 75,232,337,- (89,56%), target output sebanyak 40 mbps kuota internet dan terealisasi sebesar 40 mbps penggunaan internet kantor (100%).
 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 298,585,299,- realisasi sebesar Rp. 284,525,000,- (95,29%), target output sebanyak 12 SPJ dan terealisasi sebanyak 12 SPJ.
 3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- realisasi sebesar Rp. 4.970.000,- (99,40%), target output sebanyak 9 macam bahan bacaan dan terealisasi sebanyak 9 macam (100%).
 4. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 43,940,000,- realisasi sebesar Rp. 43,940,000,- (100,00%), target output sebanyak 166 kali dan terealisasi sebanyak 166 kali (98,78%).
 5. Pelayanan Administrasi Ketatausahaan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 46,242,000,- realisasi sebesar Rp. 46,242,000,- (100,00%), target output kinerja sebanyak 7 dokumen ketatausahaan dan terealisasi sebanyak 7 Dokumen (95,44%).
- II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 211.025.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 154.709.310,- (73,31%) yang terdiri atas 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 17,000,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 16,940,000,- (99,65%), target output sebanyak 1 unit peralatan kantor dan terealisasi sebanyak 1 unit (100%).
 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional dengan jumlah anggaran sebesar Rp.135,250,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 79,027,310,- (58,43%), target output sebanyak 26 unit kendaraan dinas yang dipelihara dan terealisasi sebanyak 16 unit (61,54%).
 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 58,775,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 58,742,000,- (99,94%), target output sebanyak 7 macam peralatan kantor yang dipelihara dan terealisasi sebanyak 7 macam (100%).
- III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 159.103.700,- realisasi sebesar Rp. 58,742,000,- (100%) terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 37,787,200,- realisasi sebesar Rp. 37,787,200,- (100%), target output sebanyak 2 dokumen capaian kinerja yang disusun dan terealisasi sebanyak 2 dokumen (100%).
 2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 72,978,500,- realisasi sebesar Rp. 72,978,500,- (100%), target output sebanyak 1 dokumen laporan keuangan yang disusun dan terealisasi sebanyak 1 dokumen (100%).
 3. Penyusunan Dokumen-dokumen Perencanaan dan Penganggaran dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 48,338,000,- realisasi sebesar Rp. 48,338,000,- (100%), target output sebanyak 4 dokumen perencanaan dan penganggaran dan terealisasi sebanyak 4 dokumen (100%).
- IV. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.150.552.266,- realisasi sebesar Rp.1.150.552.266,- (100%) terdiri dari 8 (delapan) kegiatan, yaitu :

1. Peningkatan sumber-sumber Pendapatan Daerah PAD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 38,212,500,- dengan realisasi sebesar Rp. 38,212,500,- (100%), target output sebanyak 35 dokumen Laporan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah dan terealisasi sebanyak 35 dokumen (100%).
2. Pengelolaan Administrasi Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3,689,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3,689,000,- (100%), target output sebanyak 6 dokumen Laporan Dana Transfer dan terealisasi 6 dokumen (100%).
3. Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan PBB-P2 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 134,098,750,- dengan realisasi sebesar Rp. 134,098,750,- (100%), target output sebanyak 366.575 SPPT PBB-P2 yang diterbitkan dan terealisasi sebanyak 384.830 SPPT PBB-P2 (104,98%).
4. Peningkatan Perencanaan Pendapatan Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 46,807,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 46,807,000,- (100%), target output sebanyak 20 dokumen Laporan Perencanaan Pendapatan Daerah dan terealisasi sebanyak 20 dokumen (100%).
5. Peningkatan Pelayanan BPHTB dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 84,975,500,- dengan realisasi sebesar Rp. 84,975,500,-(100%), target output sebanyak 7.318 SKPD BPHTB yang diterbitkan dan terealisasi sebanyak 9.533 SKPD (144,02%).
6. Peningkatan Pengelolaan Penetapan Pajak dan Retribusi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 41,994,200,- dengan realisasi sebesar Rp. 41,994,200,- (100%), target output sebanyak 182 SKPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Air Bawah Tanah dan terealisasi sebanyak 250 SKPD (130,27%).
7. Peningkatan Efektifitas Penatausahaan Keuangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3,580,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3,580,000,- (100%), target output sebanyak 12 dokumen Laporan realisasi keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disusun dan terealisasi sebanyak 12 dokumen (100%).


8. Optimalisasi Penagihan Pajak dan Retribusi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 797,195,316,- dengan realisasi sebesar Rp. 797,195,316,- (100%), target output sebanyak 380.297 wajib pajak yang ditagih dan terealisasi sebanyak 384.830 wajib pajak (101,19%).

- V. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 836.560.575,- realisasi sebesar Rp. 731.501.575,- (87,44%) terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu :
 1. Evaluasi Peraturan Perundangan-undangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 20,283,500,- dengan realisasi sebesar Rp. 20,283,500,- (100%), target output 8 Peraturan Daerah yang akan dievaluasi dan terealisasi 8 Peraturan Daerah (100%).
 2. Peningkatan fasilitasi Penertiban dan Keberatan dalam Pelayanan Pajak dan Retribusi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 48,023,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 48,023,000,- (100%). Target output sebanyak 2 kasus/permasalahan sengketa pajak yang tertangani dan terealisasi sebanyak 2 kasus (100%).
 3. Peningkatan Pengawasan Regulasi Pajak dan Retribusi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 47,753,850,- dengan realisasi sebesar Rp. 47,753,850,- (100%), target output sebanyak 35 Peraturan Daerah terkait Pajak dan Retribusi yang dilakukan pengawasan, dan terealisasi sebanyak 35 Peraturan Daerah (100%).
 4. Peningkatan Pengelolaan Benda Berharga dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 720,500,225,- dengan realisasi sebesar Rp. 615,441,225,- (85,42%), target output sebanyak 24 macam benda berharga yang dikelola dan terealisasi sebanyak 24 macam (100%).

Keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa di tahun 2020 meningkatkan penerimaan pendapatan daerah sektor pajak yaitu target Pendapatan Daerah Rp 104.579.635.430,- dengan realisasi Rp 115.607.377.648,- (110,54%) dan anggaran belanja sebesar Rp. 13,684,553,182.05,- realisasi sebesar Rp. 11,400,970,746,- (83,31%).

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja terdiri atas:

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran, yaitu : terdapat 1 kegiatan dengan nilai realisasi 61,54%, yaitu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, terdapat beberapa kendaraan dinas yang berkedudukan di kecamatan yang digunakan oleh kolektor pajak tidak memenuhi panggilan samsat untuk dilakukan cek fisik kendaraan sehingga pembayaran pajaknya tidak terbayar.
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran, terdapat 14 kegiatan sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% dari 23 kegiatan yang dikelola.
- c. Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran, yaitu terdapat 3 kegiatan dengan realisasi pencapaian diatas 100%.
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja, yaitu prinsip efisiensi bahwa kegiatan tersebut dengan realisasi yang ada terealisasi 99% dan 1 % adalah efisiensi sehingga dapat dikatakan bahwa sebenarnya kegiatan tersebut telah mencapai target kinerja.
- e. Faktor pendorong terpenuhi atau melebihi kinerja antara lain kerjasama antara seluruh komponen aparatur Badan Pendapatan Daerah dalam menggali potensi dan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah serta partisipasi masyarakat, terutama wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban melapor dan membayar serta mitra kerja yang mampu menyelesaikan kewajiban secara tepat waktu dan memuaskan, adanya reward bagi pengelola PBB-P2 di tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa yang mencapai target pemungutan pajak akan diberikan penghargaan. Sosialisasi Pembayaran Pajak melalui media sosial, baliho, banner, dan pertemuan dengan pengelola pajak di tingkat kecamatan, desa/kelurahan, serta masyarakat. Kerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng, Badan Pertanahan Nasional Wilayah Kab. Gowa, Para Ikatan Notaris dan PPAT dan Pengembang Perumahan wilayah Kab. Gowa.



Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1. dibawah ini.

Tabel 2.1.
REVIEW HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2021
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
5.02.0.00.0.00.03.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH									
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PELAKSANAAN LAYANAN PENUNJANG SKPD	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
5 02 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5 02 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	5 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%
5 02 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	5 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%
5 02 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5 02 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	37 Orang	45 Orang	43 Orang	43 Orang	100%	42 Orang	42 Orang	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
5 02 01 2 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Kegiatan yang diverifikasi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
5 02 01 2 02 05	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
5 02 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5 02 01 2 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	13 Jenis	11 Jenis	11 Jenis	11 Jenis	100,00%	13 Jenis	13 Jenis	100,00%
5 02 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan literatur referensi bacaan aparatur yang tersedia	7 Jenis	8 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	100,00%	7 Jenis	7 Jenis	100,00%
5 02 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri	200 Kali	163	166	166	100,00%	200 Kali	200 Kali	100,00%
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi yang diadakan	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	100%	12 Kali	12 Kali	100,00%
5 02 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5 02 01 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	2 Unit	21 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00%	2 Unit	2 Unit	100,00%
5 02 01 2 07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aplikasi pajak daerah yang diadakan	1 Buah	-	-	-	-	2 Buah	2 Buah	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
5 02 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5 02 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Besaran paket data internet kantor yang digunakan	100 Mbps	40 Mbps	40 Mbps	40 Mbps	100,00%	100 Mbps	100 Mbps	100,00%
5 02 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis barang habis pakai yang disediakan	50 Jenis	44 Jenis	46 Jenis	48 Jenis	104,35%	50 Jenis	50 Jenis	104,35%
5 02 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5 02 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	26 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit	100,00%	226 Unit	226 Unit	100,00%
5 02 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	47 Unit	32 Unit	32 Unit	32 Unit	100,00%	36 Unit	36 Unit	100,00%
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK TERHADAP POTENSI PAJAK DAERAH	100%	100,15%	100,00%	100,02%	100,02%	100%	100%	100,00%
		INDEKS KEPUASAN WAJIB PAJAK TERHADAP PELAYANAN PBB-P-2 DAN BPHTB	94,30%	92,36%	92,50%	93,27%	100,83%	94,00%	94,00%	100,00%
		PERSENTASE WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAKNYA TEPAT WAKTU	96,64%	95,14%	95,23%	96,15%	100,97%	96,50%	96,50%	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE PENINJAUAN LOKASI OBJEK PAJAK TERHADAP TOTAL PEMOHON BPHTB	11,93%	11,35%	9,72%	13,43%	138,17%	10,72%	10,83%	101,03%
5 02 04 2 01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Perencanaan Potensi Pajak Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pendapatan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase Penyelenggaraan Penagihan Pajak Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pajak Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5 02 04 2 01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen laporan perencanaan pajak daerah yang disusun	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen
5 02 04 2 01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen laporan pengembangan potensi pendapatan daerah yang disusun	35 Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen
5 02 04 2 01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah peserta sosialisasi yang memperoleh pengetahuan kebijakan pajak daerah	150 Peserta	30 Peserta	70 Peserta	70 Peserta	100,00%	70 Peserta	70 Peserta	100,00%
5 02 04 2 01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah jenis benda berharga yang dikelola	40 Jenis	24 Jenis	24 Jenis	24 Jenis	100,00%	34 Jenis	34 Jenis	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
5 02 04 2 01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	390.797 Objek Pajak	361.503 Objek Pajak	358.275 Objek Pajak	358.189 Objek Pajak	99,98%	366.575 Objek Pajak	384.830 Objek Pajak	104,98%
5 02 04 2 01 06	Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak daerah	Jumlah data pajak daerah yang dikelola dan dilaporkan melalui aplikasi	10.155 Data Pajak	8.670 Data Pajak	7.018 Data Pajak	1.0107 Data Pajak	144,02%	7.318 Data Pajak	9.533 Data Pajak	130,27%
5 02 04 2 01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah perhitungan, penetapan, dan penerbitan SKPD	1.075 SKPD	521 SKPD	685 SKPD	693 SKPD	101,17%	895 SKPD	912 SKPD	101,90%
5 02 04 2 01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang dilayani	15.449 wajib pajak	15.230 wajib pajak	15.346 wajib pajak	15.384 wajib pajak	100,25%	15.420 wajib pajak	15.420 wajib pajak	100,00%
5 02 04 2 01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen laporan PAD yang telah diverifikasi dan divalidasi	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	12 Dokumen	100,00%	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
5 02 04 2 01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang ditagih	390.797 Wajib Pajak	370.156 Wajib Pajak	380.297 Wajib Pajak	384.830 Wajib Pajak	101,19%	390.297 Wajib Pajak	390.297 Wajib Pajak	101,19%
5 02 04 2 01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah penanganan keberatan pajak yang tertangani	70 Pengaduan	89 Pengaduan	85 Pengaduan	83 Pengaduan	102,41%	80 Pengaduan	80 Pengaduan	100,00%
5 02 04 2 01 13	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah objek pajak yang disurvei	920 Objek Pajak	1.350 Objek Pajak	850 Objek Pajak	905 Objek Pajak	106,47%	900 Objek Pajak	900 Objek Pajak	106,47%

Sungguminasa, 5 April 2021

Kepala Badan Pendapatan Daerah



Drs. H. Asmail Majid
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19620917 199103 1 005

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa memiliki fungsi pelayanan bidang pendapatan daerah berdasarkan regulasi sebagai berikut :

NO	Nama Peraturan Daerah	Nomor dan Tanggal Penetapan
1	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	Nomor 01 Tahun 2011, 10 Januari 2011
2	Pajak Air Tanah	Nomor 02 Tahun 2011, 10 Januari 2011
3	Pencabutan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2001, Peraturan Daerah No 20 Tahun 2001, Peraturan Daerah No 28 Tahun 2001, Peraturan Daerah No 7 Tahun 2002, Peraturan Daerah No 9 Tahun 2007 Dan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2008	Nomor 06 Tahun 2011, 05 Mei 2011
4	Pajak Hotel	Nomor 08 Tahun 2011, 09 Mei 2011
5	Pajak Restoran	Nomor 09 Tahun 2011, 09 Mei 2011
6	Pajak Hiburan	Nomor 10 Tahun 2011, 09 Mei 2011
7	Pajak Penerangan Jalan	Nomor 11 Tahun 2011, 09 Mei 2011
8	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	Nomor 12 Tahun 2011, 09 Mei 2011
9	Retribusi Pelayanan Pasar	Nomor 14 Tahun 2011, 09 Mei 2011
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Nomor 15 Tahun 2011, 09 Mei 2011
11	Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggarahan/Villa	Nomor 16 Tahun 2011, 09 Mei 2011
12	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Nomor 17 Tahun 2011, 09 Mei 2011
13	Retribusi Izin Trayek	Nomor 18 Tahun 2011, 09 Mei 2011
14	Retribusi Terminal	Nomor 19 Tahun 2011, 09 Mei 2011
15	Pajak Reklame	Nomor 20 Tahun 2011, 09 Mei 2011
16	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Nomor 21 Tahun 2011, 01 Juni 2011
17	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Nomor 01 Tahun 2012, 10 Januari 2012
18	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	Nomor 02 Tahun 2012, 10 Januari 2012

19	Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga	Nomor 03 Tahun 2012, 10 Januari 2012
20	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Nomor 04 Tahun 2012, 10 Januari 2012
21	Retribusi Rumah Potong Hewan	Nomor 05 Tahun 2012, 10 Januari 2012
22	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil	Nomor 06 Tahun 2012, 10 Januari 2012
23	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Nomor 07 Tahun 2012, 10 Januari 2012
24	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Nomor 08 Tahun 2012, 10 Januari 2012
25	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Nomor 09 Tahun 2012, 10 Januari 2012
26	Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat	Nomor 10 Tahun 2012, 11 Januari 2012
27	Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	Nomor 11 Tahun 2012, 11 Januari 2012
28	Pajak Parkir	Nomor 12 Tahun 2012, 05 April 2012
29	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Nomor 13 Tahun 2012, 05 April 2012
30	Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus	Nomor 14 Tahun 2012, 05 April 2012
31	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Nomor 11 Tahun 2013, 24 September 2013
32	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Nomor 04 Tahun 2016, 04 April 2016
33	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Nomor 03 Tahun 2016, 04 April 2016

Sedangkan Fungsi badan Pendapatan Daerah antara lain:

1. Merumuskan kebijakan teknis pendapatan daerah;
2. Perencanaan pendapatan, pelayanan pendapatan daerah;
3. Penetapan, penagihan, dan pembukuan pendapatan daerah;
4. Pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah;
5. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatatusahaan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Analisis kinerja pelayanan dirumuskan dalam tabel pada tabel 2.2. dibawah ini.

Tabel 2.2.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GOWA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
					(thn n-1)	(thn n)	(thn n +1)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n +1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14
A	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PELAKSANAAN LAYANAN PENUJANG SKPD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun</i>			<i>4 Dokumen</i>	<i>5 Dokumen</i>	<i>5 Dokumen</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>5 Dokumen</i>	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah dokumen capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja yang disusun</i>			<i>3 Dokumen</i>	<i>5 Dokumen</i>	<i>5 Dokumen</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>5 Dokumen</i>	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan</i>			<i>43 Orang</i>	<i>42 Orang</i>	<i>37 Orang</i>	<i>43 Orang</i>	<i>43 Orang</i>	<i>37 Orang</i>	
	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah dokumen Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Kegiatan yang diverifikasi</i>			<i>12 Dokumen</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>12 Dokumen</i>	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun</i>			<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia</i>			<i>11 Jenis</i>	<i>13 Jenis</i>	<i>13 Jenis</i>	<i>11 Jenis</i>	<i>11 Jenis</i>	<i>13 Jenis</i>	
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan</i>	<i>Jumlah jenis bahan bacaan dan literatur referensi bacaan aparatur yang tersedia</i>			<i>9 Jenis</i>	<i>7 Jenis</i>	<i>7 Jenis</i>	<i>9 Jenis</i>	<i>9 Jenis</i>	<i>7 Jenis</i>	
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri</i>			<i>166 Kali</i>	<i>200 Kali</i>	<i>200 Kali</i>	<i>166 Kali</i>	<i>166 Kali</i>	<i>200 Kali</i>	
		<i>Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi yang diadakan</i>			<i>12 Kali</i>	<i>12 Kali</i>	<i>12 Kali</i>	<i>12 Kali</i>	<i>12 Kali</i>	<i>12 Kali</i>	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan</i>			<i>1 Unit</i>	<i>2 Unit</i>	<i>2 Unit</i>	<i>1 Unit</i>	<i>1 Unit</i>	<i>2 Unit</i>	

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
					(thn n-1)	(thn n)	(thn n +1)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n +1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen laporan perencanaan pajak daerah yang disusun			20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen laporan pengembangan potensi pendapatan daerah yang disusun			35 Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah peserta sosialisasi yang memperoleh pengetahuan kebijakan pajak daerah			70 Peserta	70 Peserta	150 Peserta	70 Peserta	70 Peserta	150 Peserta	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah jenis benda berharga yang dikelola			24 Jenis	34 Jenis	40 Jenis	24 Jenis	34 Jenis	40 Jenis	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah			358.275 Objek Pajak	366.575 Objek Pajak	390.797 Objek Pajak	358.189 Objek Pajak	384.830 Objek Pajak	390.797 Objek Pajak	
	Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak daerah	Jumlah data pajak daerah yang dikelola dan dilaporkan melalui aplikasi			7.018 Data Pajak	7.318 Data Pajak	10.155 Data Pajak	1.0107 Data Pajak	9.533 Data Pajak	10.155 Data Pajak	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah perhitungan, penetapan, dan penerbitan SKPD			685 SKPD	895 SKPD	1.075 SKPD	693 SKPD	912 SKPD	1.075 SKPD	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang dilayani			15.346 wajib pajak	15.420 wajib pajak	15.449 wajib pajak	15.384 wajib pajak	15.420 wajib pajak	15.449 wajib pajak	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen laporan PAD yang telah diverifikasi dan divalidasi			12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang ditagih			390.284 Wajib Pajak	380.297 Wajib Pajak	390.797 Wajib Pajak	370.156 Wajib Pajak	384.830 Wajib Pajak	390.797 Wajib Pajak	
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah penanganan keberatan pajak yang tertangani			85 Pengaduan	80 Pengaduan	70 Pengaduan	83 Pengaduan	80 Pengaduan	70 Pengaduan	
	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah objek pajak yang disurvei			1.000 Objek Pajak	850 Objek Pajak	920 Objek Pajak	1.350 Objek Pajak	905 Objek Pajak	920 Objek Pajak	

Sungguminasa, 5 April 2021

Kepala Badan Pendapatan Daerah



Drs. H. Ismail Majid

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19620917 199103 1 005

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan Daerah khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pajak daerah oleh Badan Pendapatan Daerah sebagai lembaga teknis penghasil PAD dalam bidang pajak daerah.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Gowa Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa yang diimplementasikan melalui Visi dan Misi Badan, dengan dilandasai oleh isu penting penyelegaraan tugas dalam sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah, hal tersebut merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang terbagi dalam kurun waktu tahunan sesuai penentuan APBD.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Badan Pendapatan Daerah dihadapkan pada beberapa permasalahan, yaitu :

1. Masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban untuk membayar pajak.
2. Sarana Pelayanan Pajak pada kantor Badan Pendapatan Daerah masih perlu dilakukan pembenahan dengan tempat yang lebih luas dan fasilitas pelayanan publik yang lengkap.
3. Masih kurang optimalnya sistem yang mendorong akuntabilitas dan transparansi pajak, dalam hal ini dikaitkan dengan manajemen sistem informasi pelayanan perpajakan khususnya pelayanan perpajakan yang berbasis Informasi dan Teknologi (IT).
4. Tantangan dalam hal profesionalisme dan integritas SDM Pelayan Pajak (Aparatur) dalam pelayanan perpajakan.

5. Belum adanya kajian potensi penerimaan pajak daerah dengan Analisa Potensi Penerimaan Pajak Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah, terdapat faktor-faktor penghambat sebagai tantangan dan pendorong sebagai peluang atas pelayanan yang diberikan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Berikut faktor penghambat dan faktor pendorong yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

Faktor Penghambat:

1. Belum tersedia SDM yang terlatih, khususnya dalam bidang audit pajak dan audit pajak berbasis Teknologi;
2. Masih kurangnya revisi regulasi yang sesuai dengan peraturan, perundang-undangan disesuaikan kondisi yang ada/terkini;
3. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah belum tersosialisasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan, sehingga banyak wajib pajak yang belum memahami hak dan kewajibannya;
4. Pengelolaan piutang pajak belum optimal;
5. Anggaran yang dikelola Bidang Pendapatan belum dapat mendorong hasil pendapatan asli daerah secara optimal;

Sedangkan faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja guna tercapainya tujuan dan sasaran sehingga dapat teratasi segala permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu:

Faktor Pendorong

1. Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa sebagai pemungut Pajak Daerah serta koordinator penerimaan pendapatan daerah
2. Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai dengan jumlah petugas pelayan pajak yang memadai sehingga tercipta hubungan kerja yang baik, dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
3. Posisi strategis kab. Gowa yang berbatasan dengan ibu kota Provinsi Sul-Sel memberikan pengaruh besar terhadap laju perdagangan, jasa dan industri serta pintu gerbang investasi di berbagai sektor.

4. Disusunnya regulasi peraturan pajak;
5. Mekanisme kerja yang berorientasi kepada pencapaian kinerja dari pada pembangunan sektoral.
6. Adanya dukungan SKPD terhadap upaya peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga mampu memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

Analisis lingkungan diperlukan agar dapat mengetahui dan menetapkan faktor-faktor keberhasilan suatu organisasi baik terhadap lingkungan internal maupun eksternal. Salah satu perangkat yang digunakan dalam menganalisa permasalahan adalah analisa SWOT, yaitu:

<p style="text-align: center;">Strength (Kekuatan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya sistem komputerisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah • Tersedianya anggaran / dana yang memadai. • Terdapatnya Perda dan Perbup sebagai dasar hukum. • Motivasi Kerja pegawai yang baik. • Komitmen pimpinan dan staff untuk mewujudkan misi Bapenda 	<p style="text-align: center;">Weakness (Kelemahan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem pendataan wajib pajak yang belum efektif. • Sarana dan prasarana kerja terbatas/belum memadai. • Koordinasi pihak internal dan eksternal belum optimal. • Kualitas Pelayanan belum optimal. • <i>Responsibility</i> aparatur yang masih rendah
<p style="text-align: center;">Opportunity (Peluang)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Eksekutif dan Legislatif • Perkembangan PDRB dan pendapatan perkapita positif. • Bertambahnya penduduk dengan berbagai mata pencaharian. • Kondisi sosial kota yang aman dan kondusif. • Bertambahnya jumlah perusahaan/pengusaha (Potensi PAD meningkat). • Kemajuan teknologi dan pemanfaatan sistem informasi. • Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat penjenjangan dan teknis. • Kesiadaan pihak swasta dalam pengelolaan/pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. • Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi) sistem perpajakan daerah • Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan • Pengkajian atas potensi dari pajak daerah • Optimalisasi penyerapan pendapatan dari pajak daerah 	<p style="text-align: center;">Threat (Ancaman)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi sosial politik tidak stabil. • Adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan. • Resistensi masyarakat terhadap Perda Pajak dan Retribusi Daerah • Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi rendah • Masih terdapat beberapa Wajib Pungut Pajak yang menolak dipasang alat rekam pajak

Dari hasil analisis lingkungan yang telah dilakukan, Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa telah dapat merumuskan faktor-faktor keberhasilan pencapaian visi dan misi organisasi. Penentuan faktor-faktor keberhasilan dilakukan melalui 4 (empat) strategi, yaitu :

1. Mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
2. Menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.
3. Mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang
4. Mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Maksud dilaksanakan telaahan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program /kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Adapun telaah terhadap rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa sebagai berikut:

Tabel 2.3.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KABUPATEN GOWA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PROGRAM PENUIANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	PERSENTASE PELAKSANAAN LAYANAN PENUNDAK SKPD	100,00%	10.596.362.534	PROGRAM PENUIANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	PERSENTASE PELAKSANAAN LAYANAN PENUNDAK SKPD	100,00%	10.596.362.534	Sekretariat
1	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Persentase ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	107.985.014	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah dokumen perencanaan dan capaian kinerja yang disusun	100%	107.985.014	Sekretariat
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	5 Dokumen	58.875.152	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	5 Dokumen	58.875.152	Sekretariat
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah dokumen capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	5 Dokumen	49.109.862	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah dokumen capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	5 Dokumen	49.109.862	Sekretariat
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan	100%	9.868.830.090	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah dokumen laporan penatausahaan keuangan yang disusun	100%	9.868.830.090	Sekretariat
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	37 Orang	9.425.817.921	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	37 Orang	9.425.817.921	Sekretariat
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah dokumen Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Kegiatan yang diverifikasi	12 Dokumen	358.789.467	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah dokumen Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Kegiatan yang diverifikasi	12 Dokumen	358.789.467	Sekretariat
	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	84.222.701	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	84.222.701	Sekretariat
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	11.808.693	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	11.808.693	Sekretariat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	13 Jenis	6.124.693	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	13 Jenis	6.124.693	Sekretariat
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah jenis bahan bacaan dan literatur referensi bacaan aparatur yang tersedia	7 Jenis	5.684.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah jenis bahan bacaan dan literatur referensi bacaan aparatur yang tersedia	7 Jenis	5.684.000	Sekretariat
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri	200 Kali	178.563.875	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri	200 Kali	178.563.875	Sekretariat
			Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi yang diadakan	12 Kali				Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi yang diadakan	12 Kali		Sekretariat
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	250.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah aset yang diadakan	100%	250.000.000	Sekretariat
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	2 Unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	2 Unit	50.000.000	Sekretariat
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah aplikasi pajak daerah yang diadakan	1 Buah	200.000.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah aplikasi pajak daerah yang diadakan	1 Buah	200.000.000	Sekretariat
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	147.815.333	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah ASN yang terfasilitasi dengan internet kantor dan Barang Habis Pakai	100%	147.815.333	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Besaran paket data internet kantor yang digunakan	100 Mbps	120.152.851	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Besaran paket data internet kantor yang digunakan	100 Mbps	120.152.851	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah jenis barang habis pakai yang disediakan	50 Jenis	27.662.482	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah jenis barang habis pakai yang disediakan	50 Jenis	27.662.482	Sekretariat
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	209.923.404	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah Kendaraan Dinas dan Peralatan Mesin Kantor yang dipelihara	100%	209.923.404	Sekretariat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	26 Unit	148.288.404	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	26 Unit	148.288.404	Sekretariat
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	47 Unit	61.635.000	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	47 Unit	61.635.000	Sekretariat
B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Gowa	PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK TERHADAP POTENSI PAJAK DAERAH	100,00%	1.980.503.575	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Gowa	PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK TERHADAP POTENSI PAJAK DAERAH	100,00%	1.980.503.575	Bid. Perencanaan
			INDEKS KEPUASAN WAJIB PAJAK TERHADAP PELAYANAN PBB-P-2 DAN BPHTB	94,30%				INDEKS KEPUASAN WAJIB PAJAK TERHADAP PELAYANAN PBB-P-2 DAN BPHTB	94,30%		Bid. Pelayanan
			PERSENTASE WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAKNYA TEPAT WAKTU	96,64%				PERSENTASE WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAKNYA TEPAT WAKTU	96,64%		Bid. Penetapan
			PERSENTASE PENINJAUAN LOKASI OBJEK PAJAK TERHADAP TOTAL PEMOHON BPHTB	11,93%				PERSENTASE PENINJAUAN LOKASI OBJEK PAJAK TERHADAP TOTAL PEMOHON BPHTB	11,93%		Bid. Pengawasan
7	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Gowa	Persentase Penyelenggaraan Perencanaan Potensi Pajak Daerah	100%	1.980.503.575	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Gowa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah yang disusun	100%	1.980.503.575	Seluruh Bidang Teknis
			Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pendapatan Daerah	100%					100%		
			Persentase Penyelenggaraan Penagihan Pajak Daerah	100%					100%		
			Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pajak Daerah	100%					100%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Gowa	Jumlah dokumen laporan perencanaan pajak daerah yang disusun	20 Dokumen	68.404.517	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Gowa	Jumlah dokumen laporan perencanaan pajak daerah yang disusun	20 Dokumen	68.404.517	Bid. Perencanaan
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Gowa	Jumlah dokumen laporan pengembangan potensi pendapatan daerah yang disusun	35 Dokumen	67.474.947	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Gowa	Jumlah dokumen laporan pengembangan potensi pendapatan daerah yang disusun	35 Dokumen	67.474.947	Bid. Perencanaan
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Gowa	Jumlah peserta sosialisasi yang memperoleh pengetahuan kebijakan pajak daerah	150 Peserta	81.521.063	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Gowa	Jumlah peserta sosialisasi yang memperoleh pengetahuan kebijakan pajak daerah	150 Peserta	81.521.063	Bid. Perencanaan
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Gowa	Jumlah jenis benda berharga yang dikelola	40 Jenis	356.385.106	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Gowa	Jumlah jenis benda berharga yang dikelola	40 Jenis	356.385.106	Bid. Pengawasan
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Gowa	Jumlah pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	390.797 Objek Pajak	136.145.030	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Gowa	Jumlah pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	390.797 Objek Pajak	136.145.030	Bid. Pelayanan
	Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak daerah	Kab. Gowa	Jumlah data pajak daerah yang dikelola dan dilaporkan melalui aplikasi	10.155 Data Pajak	85.818.632	Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak daerah	Kab. Gowa	Jumlah data pajak daerah yang dikelola dan dilaporkan melalui aplikasi	10.155 Data Pajak	85.818.632	Bid. Pelayanan
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Gowa	Jumlah perhitungan, penetapan, dan penerbitan SKPD	1.075 SKPD	129.988.066	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Gowa	Jumlah perhitungan, penetapan, dan penerbitan SKPD	1.075 SKPD	129.988.066	Bid. Penetapan
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Gowa	Jumlah wajib pajak yang dilayani	15.449 wajib pajak	3.757.586	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Gowa	Jumlah desa/kelurahan penerima dana bagi hasil pajak dan retribusi yang dilayani	15.449 wajib pajak	3.757.586	Bid. Pelayanan
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Gowa	Jumlah dokumen laporan PAD yang telah diverifikasi dan divalidasi	12 Dokumen	3.632.081	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Gowa	Jumlah dokumen laporan PAD yang telah diverifikasi dan divalidasi	12 Dokumen	3.632.081	Bid. Penetapan
	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Gowa	Jumlah wajib pajak yang ditagih	390.797 Wajib Pajak	851.197.424	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Gowa	Jumlah wajib pajak yang ditagih	390.797 Wajib Pajak	851.197.424	Bid. Penetapan
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Gowa	Jumlah penanganan keberatan pajak yang tertangani	70 Pengaduan	98.413.884	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Gowa	Jumlah penanganan keberatan pajak yang tertangani	70 Pengaduan	98.413.884	Bid. Pengawasan
	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Gowa	Jumlah objek pajak yang disurvei	920 Objek Pajak	97.765.239	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Gowa	Jumlah objek pajak yang disurvei	920 Objek Pajak	97.765.239	Bid. Pengawasan

Sungguminasa, 5 April 2021

Kepala Badan Pendapatan Daerah



Dr. H. Ismail Majid

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19620917 199103 1 005

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Badan Pendapatan Daerah secara langsung tidak melaksanakan telaah atau kajian atas usulan program dan kegiatan dari kelompok masyarakat/perorangan, badan/lembaga/organisasi swasta dan perusahaan daerah disebabkan tidak terdapatnya usulan program dan kegiatan masyarakat yang masuk melalui musrenbang mengingat tupoksi Badan Pendapatan Daerah adalah melakukan pengelolaan dan pelayanan pajak daerah melalui perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pelayanan, penetapan, penagihan, dan pengawasan serta pengendalian sumber-sumber pendapatan daerah untuk memenuhi pelaksanaan pembangunan daerah yang salah satunya diakomodir dengan mekanisme musrenbang dengan memenuhi usulan program dan kegiatan masyarakat diberbagai bidang/sector, sehingga tabel rekapitulasi usulan program dan kegiatan masyarakat yang disajikan adalah nihil yaitu sebagai berikut:

Tabel.2.4.
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021
KABUPATEN GOWA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

Nihil

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

*T*ema Pembangunan Nasional Tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” adalah tema yang ditetapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah. Tema tersebut berfokus pada 2 (dua) hal yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Pemulihan Ekonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Pemulihan daya beli dan dunia usaha yang dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya. Selain itu dilakukan pula program khusus untuk mendongkrak daya beli masyarakat dan membangkitkan dunia usaha. Pada saat yang sama, diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, dan pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital. Sasaran Pembangunan Tahun 2022 yaitu :

1. Percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator:
 - a. Pertumbuhan ekonomi
 - b. Tingkat Pengangguran terbuka;
 - c. Rasio Gini;
 - d. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator:
 - a. Indeks Pembangunan Manusia;
 - b. Tingkat Kemiskinan

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan, disusun sepuluh strategi pembangunan, yaitu: Meningkatkan nilai tambah sektor industri, Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Sektor Pariwisata, Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat, Meningkatkan Peran UMKM terhadap Ekonomi Nasional, Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur, Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Layanan Digital, Meningkatkan Capaian Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca, Mempercepat Reformasi Perlindungan Sosial, Meningkatkan Kualitas SDM dan Inovasi, serta Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional dan Penanganan Covid-19. Prioritas Pembangunan Tahun 2022 meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan Misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategi dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2021 merujuk pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Rencana Kerja Strategis Tahun 2021-2026. Adapun tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator dan Target Kinerja Tahun 2022 yang Mengacu pada Tujuan Renja

NO	TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023
1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Laju Pertumbuhan PAD	Persen (%)	1,32%	1,55%

Adapun Indikator keberhasilan tujuan dan sasaran dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran
Badan Pendapatan daerah Kab. Gowa Tahun 2022

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Laju Pertumbuhan PAD	Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah

Tabel 3.3
Indikator dan Target Kinerja Tahun 2022 yang Mengacu pada Sasaran Renja

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023
1	Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah	Persen (%)	14,00%	14,10%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah	Nilai Indeks	94,90	94,97

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut diatas, maka diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa. Strategi merupakan langkah-langkah yang ditempuh secara *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus yang didasari oleh pemikiran konseptual, analisis, dan komprehensif untuk memperkuat dan memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun strategi yang akan ditempuh dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran diatas adalah sebagai berikut:

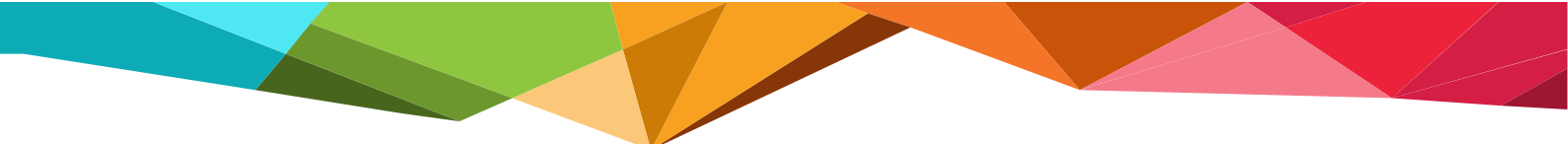
1. Peningkatan pemenuhan kewajiban pajak/retribusi bagi masyarakat dan berkurangnya tunggakan pajak daerah;
2. Peningkatan tertib administrasi pemungutan, pengendalian, sistem pengawasan internal, dan pemeriksaan pendapatan daerah;
3. Penggalian sumber-sumber potensi pendapatan baru;
4. Peningkatan akurasi data potensi penerimaan daerah;
5. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak ;
6. Percepatan regulasi dasar pemungutan pajak/retribusi daerah;
7. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme SDM dalam pelayanan publik;
8. Peningkatan dan pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana penunjang pelayanan berbasis IT;

Sedangkan Kebijakan yang ditempuh dalam rangka mewujudkan strategi tersebut:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan dan penagihan pendapatan daerah;
2. Pemetaan potensi pendapatan daerah;
3. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
4. Jemput bola dan mendekatkan lokasi pelayanan kepada wajib pajak
5. Pemberian sanksi bagi wajib pajak yang melanggar/menunggak;
6. Perluasan wajib pajak melalui pengumpulan data dan penetapan wajib pajak;
7. Perluasan obyek pajak melalui pendataan berkelanjutan;
8. Penyelesaian kasus pajak sesuai ketentuan perpajakan;
9. Menyesuaikan tarif Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Daerah;
11. Melakukan pembinaan peningkatan kompetensi SDM dalam pelayanan publik;
12. Melakukan pemasangan alat perekam pajak Mobile Payment Online Sistem (MPOS) dan Transaction Monitoring Device (TMD) untuk memonitoring secara online pajak restoran dan rumah makan;
13. Peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana representatif penunjang pelayanan;

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sasaran strategi SKPD. Sedangkan kegiatan adalah bagian program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa



personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi bagi kabupaten/kota. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa pada tahun 2022 dimaksudkan untuk mendukung terlaksananya tugas, pokok dan tata kerja yang secara langsung atau tidak langsung sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa yang akan dicapai tahun 2022.

Tabel 3.4.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023 KABUPATEN GOWA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan								
5.02.0.00.0.00.03.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH								
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PELAKSANAAN LAYANAN PENUNJANG SKPD	<i>Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa</i>	100,00%	10.596.362.534	<i>APBD Kab. Gowa</i>	<i>Sekretariat</i>	100%	10.805.084.502
5 02 01 2 01	<i>Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja</i>	<i>Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa</i>	100%	107.985.014	<i>APBD Kab. Gowa</i>	<i>Sekretariat</i>	100%	109.604.789
5 02 01 2 01 01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun</i>	<i>Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa</i>	<i>5 Dokumen</i>	<i>58.875.152</i>	<i>APBD Kab. Gowa</i>	<i>Sekretariat</i>	<i>5 Dokumen</i>	<i>59.758.279</i>
5 02 01 2 01 06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah dokumen capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja yang disusun</i>	<i>Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa</i>	<i>5 Dokumen</i>	<i>49.109.862</i>	<i>APBD Kab. Gowa</i>	<i>Sekretariat</i>	<i>5 Dokumen</i>	<i>49.846.509</i>
5 02 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	100%	9.868.830.090	<i>APBD Kab. Gowa</i>	<i>Sekretariat</i>	100%	10.167.249.810
5 02 01 2 02 01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan</i>	<i>Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa</i>	<i>37 Orang</i>	<i>9.425.817.921</i>	<i>APBD Kab. Gowa</i>	<i>Sekretariat</i>	<i>37 Orang</i>	<i>9.717.592.459</i>
5 02 01 2 02 03	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah dokumen Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Kegiatan yang diverifikasi</i>	<i>Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>358.789.467</i>	<i>APBD Kab. Gowa</i>	<i>Sekretariat</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>364.171.309</i>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 01 2 02 05	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	1 Dokumen	84.222.701	APBD Kab. Gowa	Sekretariat	1 Dokumen	85.486.042
5 02 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	100%	11.808.693	APBD Kab. Gowa	Sekretariat	100%	12.016.447
5 02 01 2 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	13 Jenis	6.124.693	APBD Kab. Gowa	Sekretariat	15 Jenis	6.247.187
5 02 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan literatur referensi bacaan aparatur yang tersedia	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	7 Jenis	5.684.000	APBD Kab. Gowa	Sekretariat	7 Jenis	5.769.260
5 02 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	200 Kali	178.563.875	APBD Kab. Gowa	Sekretariat	215 Kali	183.920.791
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi yang diadakan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	12 Kali		APBD Kab. Gowa	Sekretariat	12 Kali	
5 02 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	100%	250.000.000	APBD Kab. Gowa	Sekretariat	100%	150.750.000
5 02 01 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	2 Unit	50.000.000	APBD Kab. Gowa	Sekretariat	5 Unit	50.750.000
5 02 01 2 07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aplikasi pajak daerah yang diadakan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	1 Buah	200.000.000	APBD Kab. Gowa	Sekretariat	1 Buah	100.000.000
5 02 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	100%	147.815.333	APBD Kab. Gowa	Sekretariat	100%	149.617.626
5 02 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Besaran paket data internet kantor yang digunakan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	100 Mbps	120.152.851	APBD Kab. Gowa	Sekretariat	100 Mbps	121.955.144
5 02 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis barang habis pakai yang disediakan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	50 Jenis	27.662.482	APBD Kab. Gowa	Sekretariat	48 Jenis	27.662.482

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	100%	209.923.404	APBD Kab. Gowa	Sekretariat	100%	215.845.830
5 02 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	26 Unit	148.288.404	APBD Kab. Gowa	Sekretariat	26 Unit	150.512.730
5 02 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	47 Unit	61.635.000	APBD Kab. Gowa	Sekretariat	53 Unit	65.333.100
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK TERHADAP POTENSI PAJAK DAERAH	Kab. Gowa	100,00%	1.980.503.575	APBD Kab. Gowa	Bid. Perencanaan	100,00%	2.007.695.214
		INDEKS KEPUASAN WAJIB PAJAK TERHADAP PELAYANAN PBB-P-2 DAN BPHTB	Kab. Gowa	94,30%		APBD Kab. Gowa	Bid. Pelayanan	94,68%	
		PERSENTASE WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAKNYA TEPAT WAKTU	Kab. Gowa	96,64%		APBD Kab. Gowa	Bid. Penetapan	96,72%	
		PERSENTASE PENJAUAN LOKASI OBJEK PAJAK TERHADAP TOTAL PEMOHON BPHTB	Kab. Gowa	11,93%		APBD Kab. Gowa	Bid. Pengawasan	12,20%	
5 02 04 2 01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Perencanaan Potensi Pajak Daerah	Kab. Gowa	100%	1.980.503.375	APBD Kab. Gowa	Seluruh Bidang Teknis	100%	2.007.695.214
		Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pendapatan Daerah	Kab. Gowa	100%		APBD Kab. Gowa	Seluruh Bidang Teknis	100%	
		Persentase Penyelenggaraan Penagihan Pajak Daerah	Kab. Gowa	100%		APBD Kab. Gowa	Seluruh Bidang Teknis	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Gowa	100%		APBD Kab. Gowa	Seluruh Bidang Teknis	100%	
5	02 04 2 01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Gowa	20 Dokumen	68.404.517	APBD Kab. Gowa	Bid. Perencanaan	20 Dokumen	69.430.585
5	02 04 2 01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Gowa	35 Dokumen	67.474.947	APBD Kab. Gowa	Bid. Perencanaan	35 Dokumen	68.487.071
5	02 04 2 01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Gowa	150 Peserta	81.521.063	APBD Kab. Gowa	Bid. Perencanaan	150 Peserta	81.521.063
5	02 04 2 01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Gowa	40 Jenis	356.385.106	APBD Kab. Gowa	Bid. Pengawasan	40 Jenis	359.948.957
5	02 04 2 01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Gowa	390.797 Objek Pajak	136.145.030	APBD Kab. Gowa	Bid. Pelayanan	391.297 Objek Pajak	138.187.205
5	02 04 2 01 06	Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak daerah	Kab. Gowa	10.155 Data Pajak	85.818.632	APBD Kab. Gowa	Bid. Pelayanan	10.178 Data Pajak	87.105.911
5	02 04 2 01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Gowa	1.075 SKPD	129.988.066	APBD Kab. Gowa	Bid. Penetapan	089 Ketetapan Paji	131.937.887
5	02 04 2 01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Gowa	15.449 wajib pajak	3.757.586	APBD Kab. Gowa	Bid. Pelayanan	15.482 Wajib Pajak	3.813.950
5	02 04 2 01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Gowa	12 Dokumen	3.632.081	APBD Kab. Gowa	Bid. Penetapan	12 Dokumen	3.686.562
5	02 04 2 01 11	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Gowa	390.797 Wajib Pajak	851.197.424	APBD Kab. Gowa	Bid. Penetapan	391.297 Wajib Pajak	863.965.386
5	02 04 2 01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Gowa	70 Pengaduan	98.413.884	APBD Kab. Gowa	Bid. Pengawasan	60 pengaduan	99.890.093
5	02 04 2 01 13	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Gowa	920 Objek Pajak	97.765.239	APBD Kab. Gowa	Bid. Pengawasan	934 Objek Pajak	99.720.544

Sungguminasa, 5 April 2021

Kepala Badan Pendapatan Daerah



Drs. H. Ismail Majid

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19620917 199103 1 005

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

*P*erumusan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa didasarkan pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah (terutama misi ke-4) yaitu “Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas” melalui peningkatan Pendapatan daerah. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 terdiri dari 2 (dua) Program dan 7 (Tujuh) Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan, yaitu:

1. PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA,

terdiri dari :

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

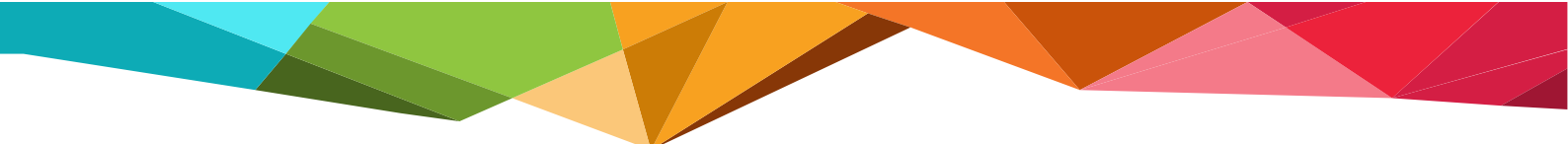
C. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan;
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- D. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud;
- E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- F. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya.

2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH, terdiri dari:

- A. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
 - Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
 - Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
 - Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - Sub Kegiatan Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak daerah
 - Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah
 - Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 - Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
 - Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah
 - Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
 - Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah



Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa tahun 2022, antara lain:

1. Pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Pencapaian Standar Pelayanan Tupoksi SKPD;
3. Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD;
4. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD;
5. Program dan Kegiatan Rutinitas/Operasional SKPD.

Berdasarkan tupoksi Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa menetapkan program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada tabel 4.1. dibawah ini.

Tabel 4.1.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA

Tahun 2022										
Kode					Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	% Porsi Pagu Anggaran
1					2	3	4	5	6	7
5					<i>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</i>					
5.02.0.00.0.00.03.00					BADAN PENDAPATAN DAERAH				12.220.481.003	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		PERSENTASE PELAKSANAAN LAYANAN PENUNJANG SKPD	100%	10.596.362.534	86,71%
5	02	01	2	01	<i>Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Kab. Gowa</i>	<i>Persentase ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja</i>	100%	107.985.014	0,88%
5	02	01	2	01	01 <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Kab. Gowa</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun</i>	<i>5 Dokumen</i>	<i>58.875.152</i>	<i>0,48%</i>
5	02	01	2	01	06 <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa</i>	<i>Jumlah dokumen capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja yang disusun</i>	<i>5 Dokumen</i>	<i>49.109.862</i>	<i>0,40%</i>
5	02	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan	100%	9.868.830.090	80,76%
5	02	01	2	02	01 <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Kab. Gowa</i>	<i>Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan</i>	<i>37 Orang</i>	<i>9.425.817.921</i>	<i>77,13%</i>
5	02	01	2	02	03 <i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa</i>	<i>Jumlah dokumen Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Kegiatan yang diverifikasi</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>358.789.467</i>	<i>2,94%</i>
5	02	01	2	02	05 <i>Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa</i>	<i>Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>84.222.701</i>	<i>0,69%</i>
5	02	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	11.808.693	0,10%

							Tahun 2022					
Kode							Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	% Porsi Pagu Anggaran
1							2	3	4	5	6	7
5	02	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	13 Jenis	6.124.693	0,05%	
5	02	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah jenis bahan bacaan dan literatur referensi bacaan aparatur yang tersedia	7 Jenis	5.684.000	0,05%	
5	02	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri	200 Kali	178.563.875	1,46%	
							Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi yang diadakan	12 Kali			
5	02	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	250.000.000	2,05%	
5	02	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	2 Unit	50.000.000	0,41%	
5	02	01	2	07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah aplikasi pajak daerah yang diadakan	1 Buah	200.000.000	1,64%	
5	02	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	147.815.333	1,21%	
5	02	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Besaran paket data internet kantor yang digunakan	100 Mbps	120.152.851	0,98%	
5	02	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah jenis barang habis pakai yang disediakan	50 Jenis	27.662.482	0,23%	
5	02	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	209.923.404	1,72%	
5	02	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	26 Unit	148.288.404	1,21%	
5	02	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	47 Unit	61.635.000	0,50%	

							Tahun 2022					
Kode					Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	% Porsi Pagu Anggaran	
1					2		3	4	5	6	7	
5	02	04				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Gowa	PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK TERHADAP POTENSI PAJAK DAERAH	100,00%	1.624.118.469	13,29%	
							Kab. Gowa	INDEKS KEPUASAN WAJIB PAJAK TERHADAP PELAYANAN PBB-P-2 DAN BPHTB	94,30%			
							Kab. Gowa	PERSENTASE WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAKNYA TEPAT WAKTU	96,64%			
							Kab. Gowa	PERSENTASE PENINJAUAN LOKASI OBJEK PAJAK TERHADAP TOTAL PEMOHON BPHTB	11,93%			
5	02	04	2	01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Gowa	Persentase Penyelenggaraan Perencanaan Potensi Pajak Daerah	100%	1.624.118.469	13,29%	
								Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pendapatan Daerah	100%			
								Persentase Penyelenggaraan Penagihan Pajak Daerah	100%			
								Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pajak Daerah	100%			
5	02	04	2	01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Gowa	Jumlah dokumen laporan perencanaan pajak daerah yang disusun	20 Dokumen	68.404.517	0,56%	
5	02	04	2	01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Gowa	Jumlah dokumen laporan pengembangan potensi pendapatan daerah yang disusun	35 Dokumen	67.474.947	0,55%	
5	02	04	2	01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Gowa	Jumlah peserta sosialisasi yang memperoleh pengetahuan kebijakan pajak daerah	150 Peserta	81.521.063	0,67%	

							Tahun 2022				
Kode						Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	% Porsi Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6						7
5	02	04	2	01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Gowa	Jumlah pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	390.797 Objek Pajak	136.145.030	1,11%
5	02	04	2	01	06	Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak daerah	Kab. Gowa	Jumlah data pajak daerah yang dikelola dan dilaporkan melalui aplikasi	10.155 Data Pajak	85.818.632	0,70%
5	02	04	2	01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Gowa	Jumlah perhitungan, penetapan, dan penerbitan SKPD	1.075 SKPD	129.988.066	1,06%
5	02	04	2	01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Gowa	Jumlah wajib pajak yang dilayani	15.449 wajib pajak	3.757.586	0,00
5	02	04	2	01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Gowa	Jumlah dokumen laporan PAD yang telah diverifikasi dan divalidasi	12 Dokumen	3.632.081	0,00
5	02	04	2	01	11	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Gowa	Jumlah wajib pajak yang ditagih	390.797 Wajib Pajak	851.197.424	0,07
5	02	04	2	01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Gowa	Jumlah penanganan keberatan pajak yang tertangani	70 Pengaduan	98.413.884	0,01
5	02	04	2	01	13	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Gowa	Jumlah objek pajak yang disurvei	920 Objek Pajak	97.765.239	0,01

Sungguminasa, 5 April 2021

Kepala Badan Pendapatan Daerah



Drs. H. Ismail Majid

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19620917 199103 1 005

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa merupakan pelaksanaan Rencana Strategis ke-1, periode Renstra 2021-2026. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2020 dan mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Upaya mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat, dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2021 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan yang diemban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, oleh karena itu sangat diharapkan adanya dukungan dari segenap pihak yang terkait demi tercapainya target rencana kerja tahun 2022. Semoga rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi peningkatan Pendapatan Asli daerah dan kepuasan pelayanan kepada masyarakat pada khususnya serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada umumnya. Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak atas partisipasi pemikiran yang sifatnya membangun sehingga Renja Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dapat selesai tepat pada waktunya.

Sungguminasa, 5 April 2021

Kepala Badan Pendapatan Daerah



Drs. H. Ismail Majid

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19620917 199103 1 005